BAB 1

PENDAHULUAN

1.1.Latar belakang

Profesi akuntansi merupakan salah satu profesi yang dipercaya oleh masyarakat. Profesi ini umumnya dikenal melalui jasa auditing bagi pengguna informasi keuangan. Profesi ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan membuat informasi keuangan yang andal tersedia bagi masyarakat umum sebagai dasar pengambilan keputusan. Akuntan publik bukan hanya sekedar ahli tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau *due profesional care* dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada. Setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya. Kepercayaan masyarakat akan menjadi lebih tinggi, jika profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan oleh anggota profesinya. Profesi akuntan publik bertanggung jawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan atau klien, sehingga memperoleh informasi keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan. Seorang auditor dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk kepentingan pihak lain yang mempunyai kepentingan atas laporan keuangan auditan (Ghozali dan Ivan; 2006).

Berkembangnya profesi akuntan publik telah banyak berfungsi di berbagai kalangan. Kebutuhan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas akan jasa

akuntan inilah yang menjadi pemicu perkembangan tersebut. Audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak ketiga sangat diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan, sehingga memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai. Bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan keuangan external atas kualitas audit sangatlah penting, jika pemakai jasa audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan oleh akuntan publik / Kantor Akuntan Publik maka kemampuan mereka untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang (Arens et al,2012).

Untuk membuktikan keahlian atau profesionalisme seorang auditor juga harus memiliki pengalaman dalam praktek audit, Auditor yang tidak berpengalaman lebih mungkin untuk melakukan kesalahan daripada auditor yang berpengalaman, Oleh karena itu seorang auditor yang baik dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya, yang dimaksud adalah professional yang telah dididik untuk menjalankan tugastugasnya yang kompleks secara independen dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut dengan menggunakan keahlian dan pengalaman mereka (Derber dan Schwartz, 1991 dalam Cahayu 2013:3).

Profesionalisme juga menjadi syarat utama bagi seseorang yang ingin menjadi seorang auditor eksternal. Sebab dengan profesionalisme yang tinggi kebebasan auditor akan semakin terjamin. Profesional berarti tanggung jawab untuk

berperilaku yang lebih dari sekedar memenuhi undang-undang dan peraturan masyarakat. Untuk menjalankan perannya yang menuntut tanggung jawab yang semakin luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas, auditor eksternal harus memiliki wawasan yang luas tentang kompleksitas modern. Menurut Hall (1968) Profesionalisme seorang auditor tercermin dalam lima hal yaitu : pengabdian profesi, kewajiban sosial, kemandirian, keyakinan terhadap profesi, dan hubungan dengan rekan seprofesi. Peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset dikalangan akademisi. Tidak hanya itu, praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa kontribusi apa yang telah diberikan oleh auditor. Hal tersebut sah saja dilakukan mengingat pentingnya peran auditor di kalangan masyarakat. Apalagi auditor bisa dikatakan sebagai pihak kepercayaan masyarakat maupun investor dalam memastikan informasi yang handal. Oleh karena itu auditor dalam melakukan tugasnya untuk menjadi profesional banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik bersifat teknis maupun non teknis. Adapun faktor yang mempengaruhi profesionalisme auditor antara lain faktor Ukuran KAP, Tingkat Pendidikan, Hirarki Jabatan, Pengalaman Kerja, dan Etika.

Ukuran kantor akuntan publik (KAP) dapat digolongkan menjadi tiga yaitu kantor akuntan publik besar, kantor akuntan publik sedang dan kantor akuntan publik kecil. Umumnya kantor akuntan publik besar hanya sedikit jumlahnya di Indonesia dan juga kantor akuntan publik besar bekerja sama dengan kantor akuntan publik berskala internasional. Sebagian besar terdiri dari akuntan publik sedang maupun kantor akuntan publik kecil dengan wilayah operasi yang terbatas. Kantor akuntan publik kecil hanya memiliki sedikit staff sedangkan kantor akuntan

publik besar memiliki banyak memiliki staff dan memiliki lebih dari satu orang *partner*.

Hirarki jabatan merupakan tingkat jabatan yang dijabat oleh auditor saat ini pada kantor akuntan publik (KAP). Umumnya hirarki jabatan pada kantor akuntan publik di bagi menjadi empat yaitu : *partner* (rekan), manajer, adutitor senior, dan auditor junior. Empat hirarki jabatan memiliki tanggung jawab yang berbeda tergantung pada tanggung jawab mereka. Demikian pula, banyak peneliti menemukan bahwa perbedaan antara tugas dan tanggung jawab akuntan muncul dari perbedaan posisi di mana semakin tinggi jabatan, semakin tinggi tingkat profesionalisme.

Setiap profesi selalu memiliki etika profesi tersendiri. Tidak terkecuali seorang auditor. Etika auditor dibuat untuk mengatur proses kerja auditor dan menjaga profesionalisme seorang auditor. Etika ini dibuat juga untuk melindungi para klien agar kerahasiaan data mereka tetap aman dan tidak terjadi kebocoran. Etika seorang auditor diperlukan dalam pekerjaan auditor adalah sebagai orang yang diberi kepercayaan yang bisa saja menghadapi benturan kepentingan klien antara klien maupun dengan yang lain

Secara umum etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Karena dalam pelaksanaannya pekerjaan profesional tidak lepas dari etika yang berperan sebagai pelaku profesional. Memasuki perkembangan era globalisasi keberadaan seorang auditor semakin

meluas yang diimbangi dengan kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap bersikap independen. *The American Heritage Directory* (Sukendra, 2015) menyatakan bahwa etika sebagai suatu aturan atau standar yang menentukan tingkah laku para anggota dari suatu profesi. Melalui kesadaran etis yang tinggi, maka seorang auditor cenderung profesional dalam tugasnya dan menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan standar auditing, sehingga hasil audit yang dilakukan akan lebih menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Pendidikan dan pengalaman merupakan faktor yang penting untuk menjadi auditor yang profesional. Dalam standar profesi akuntan publik, standar umum pertama menekankan bahwa setinggi apapun kemampuan di bidang lain seperti bisnis dan keuangan, seseorang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam standar audit tanpa pendidikan yang memadai dan pengalaman yang memadai dalam bidang audit. Melaksanakan audit untuk sampai pada suatu pernyataan pendapat auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang di perluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pendidikan formal auditor dan pengalaman auditor saling melengkapi satu sama lain

Penelitian-penelitian tentang akuntan publik yang dikaitkan dengan ukuran kantor akuntan banyak yang mengindikasikan bahwa akuntan *big firm* lebih profesional dibanding dengan *non firm*. Kenyataannya saat ini banyak klien lebih rasional memilih auditor eksternal, menurut Nuke (2015:04) dalam kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG Sidharta & Harsono yang terbukti menyuap aparat pajak Indonesia sebesar US\$ 75 ribu sebagai imbalan atas diterbitkannya faktur palsu

untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Bsker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York, telah menimbulkan gejolak baru bagi profesi akuntan di Indonesia. Dampak dari kasus ini adalah runtuhnya Kantor Akuntan Publik (KAP) Sidharta & Harsono setelah dinyatakan bersalah.

Berkat aksi suap ini, kewajiban pajak PT Easman Christensen memang turun drastis, dari US\$ 3,2 juta hanya menjadi US\$270 ribu. Namun, penasihat anti suap Baker rupanya khawatir dengan kelakuan anak perusahaannya. Maka, sebelum menanggung risiko yang lebih besar di kemudian hari, Baker melaporkan secara sukarela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjerat dengan Foreign Corrupt Practice Act, yaitu undang-undang anti korupsi untuk perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena Baker memohon untuk berdamai, maka kasus ini akhirnya diselesaikan diluar pengadilan dan KPMG pun terselamatkan. Pada kasus diatas, KPMG melanggar prinsip integritas, dimana KPMG menyuap aparat pajak hanya untuk kepentingan kliennya. Hal ini dapat dikatakan tidak jujur karena KPMG melakukan kecurangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai akuntan publik, sehingga KPMG juga melanggar prinsip objektif. Kasus Kantor Akuntan Publik (KAP) KPMG Sidharta & Harsono tersebut menimbulkan keraguan publik akan informasi laporan keuangan. Profesi akuntan hanya bisa dijaga jika akuntan selalu berpedoman pada kode etik, standar, dan moralitas.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi kepada kantor akuntan publik partner dari Ernst and Young (EY) karena dinilai tak teliti dalam penyajian

laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan Sherly Jokom dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

Sherly terbukti melakukan pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia. OJK menilai KAP ini melakukan pelanggaran karena tak cermat dan teliti dalam mengaudit laporan keuangan tahun PT Hanson International Tbk. (MYRX) untuk tahun buku 31 Desember 2016. Kesalahan yang dilakukan perusahaan adalah tak profesional dalam pelaksanaan prosedur audit terkait apakah laporan keuangan tahunan perusahaan milik Benny Tjokro mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Kesalahan yang dimaksud OJK adalah adanya kesalahan penyajian (overstatement) dengan nilai mencapai Rp 613 miliar karena adanya pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh (full accrual method) atas transaksi dengan nilai gross Rp 732 miliar. Selain itu, dalam laporan keuangan tersebut juga tak mengungkapkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atas kavling siap bangun (KASIBA) tertanggal 14 Juli 2019 yang dilakukan oleh Hanson International sebagai penjual

Dalam kasus laporan keuangan Garuda Indonesia, Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga pemerintah dan non pemerintah. Pasalnya dalam laporan keuangannya ditemukan kejanggalan. Kasus ini juga menyeret auditor

laoran keuangan yakni Akuntan Publik (AP) Kasner Srumapea kantor akuntan publik (KAP) Tanurata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (Member of BDO Internasional), juga dikenakan sanksi oleh kementerian.

Kasus ini berawal dari laporan keuangan Garuda Indonesia pada tahun 2018. Dalam laporan keuangannya Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD 216,5 ribu atau setara Rp 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami kerugian USD 216 juta. Komisaris Garuda Indonesia menganggap laporan keuangan tahun 2018 tidak sesuai dengan persyaratan standar akuntansi keuangan (PSAK). Garuda Indonesia memasukan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada Garuda Indonesia terkait pemasangan wifi yang belum dibayarkan. PT Mahata Aero Teknologi sendiri telah menandatangani kerjasama dengan Garuda Indonesia, dengan penandatanganan ini Mahata mencatat utang sebesar USD 239 juta kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan kedalam laporan keuangan 2018 sebagai pendapatan. Dugaan Kementerian Keuangan terhadap Fahmi Bambang & Rekan (Member of BOD Internasional), dari hasil pemeriksaan ini Kementerian Keuangan menyatakan adanya dan dugaan atas audit tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian keuangan menyatakan kelalaian yang dilakukan oleh auditor adalah yang pertama Akuntan Publik yang bersangkutan belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan piutang dan pendapatan lain-lain. Sebab Akuntan Publik ini sudah mengakui pendapatan piutang meski secara sepenuhnya mendapatkan bukti yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan substansi perjanjian

transaksi tersebut. Ketiga akuntan publik tidak bisa mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal keuangan sebafei dasar perlakuan akuntansi.

Departemen Keuangan sebagai pengawas Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik hampir setiap tahun mengeluarkan Surat Keputusan Pembekuan Ijin Akuntan Publik. Sejak Departemen Keuangan mengintensifkan pengawasannya pada tahun 2002, tercatat ada 10 Kantor Akuntan dibekukan ijin operasinya. Selanjutnya pada tahun 2003 tercatat 5 Akuntan Publik dibekukan ijin operasinya karena melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (Mayangsari, 2003). Sedangkan pada tahun 2005, 2006 2008, dan 2009 Departemen Keuangan kembali mengumumkan pembekuan 5 ijin Akuntan Publik.

Pembekuan Kantor Akuntan Publik oleh Departemen Keuangan dilakukan tanggal 11 Juni 2008 lalu terhadap KAP Drs Tahir Hidayat dan Dody Hapsoro dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KM.1/2008. Pembekuan dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Pesero) dan anak perusahaannya. (Bali Post, Juni 2008). Fonemena ini juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) diwilayah provinsi Bali. Di provinsi bali tercatat ada 8 (delapan) KAP, diantaranya 2 KAP pernah dibekukan ijinnya oleh Kementrian Keuangan selama 6 (enam) bulan. Salah satu Kantor Akuntan Publik yang pernah dibekukan ijinnya adalah KAP Gunarsa. Pembekuan dilakukan karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) – Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)

dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan dana pensiun pada PT. Bank Dagang Bali pada tahun 2009. Dari kasus yang sudah dijelaskan diatas, hal ini menunjukkan kurangnya keprofesionalisme seorang auditor dalam menjalankan tuagnya. Maka dari itu penelitian ini menguji seberapa besar tingkat profesionalisme auditor pada KAP di Bali, dimana masih terjadi auditor yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai profesi kepercayaan, akuntan harus selalu menyadari fungsinya sebagai kepercayaan masyarakat yang harus dijaga. Profesi akuntan hanya bisa *survive* jika menjaga amanah yang diberikan masyarakat atau user kepadanya, dengan cara mempertaruhkan profesionalisme mereka. Akuntabilitas manajemen publik harus sejalan dengan profesionalisme yang tinggi, moral dan etika, integritas, independen, dan bebas dari semua kepentingan diluar kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan teknis, dan profesionalisme harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas ditempat yang tertinggi. Akuntan bukan hanya sekedar ahli tetapi harus dapat melaksanakan pekerjaan profesinya dengan hati-hati atau *due profesional care* dan selalu menjunjung tinggi kode etik profesi yang ada.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelelitian ini adalah :

- 1) Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?

- 2) Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 3) Apakah hirarki jabatan berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 4) Apakah pengalaman auditor berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?
- 5) Apakah etika berpengaruh terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali ?

1.3. tujuan penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut

- 1) untuk mengetahui pengaruh variable ukuran KAP terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh variable tingkat pendidikan terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh variable hierarki jabatan terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh variable pengalaman auditor terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh variable etika terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah

- 1) Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasilnya mampu menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Menambah pengetahuan mengenai pengaruh ukuran KAP, tingkat pendidikan, hirarki jabatan, pengalaman auditor dan etika terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Memberikan bukti empiris terhadap pengaruh ukuran KAP, tingkat pendidikan, hirarki jabatan, pengalaman auditor, etika terhadap profesionalisme auditor pada kantor akuntan publik di bali. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bacaan dan referensi kepada mahasiswa yang meneliti dibidang yang sama.

2) Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait seperti kantor Akuntan publik, dan auditor dalam mengambil keputusan yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilaku. Teori atribusi merupakan teori yang dikembangkan oleh Frits Heider yang menjelaskan tentang bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu pada bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dll, dan faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan pemahaman atau reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan - alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Dalam hidupnya seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi sosial yang disebut dengan *disponitional attribution* dan *situasional attribution*.

Dispontional attribution atau penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan *situational attribution* atau penyebab eksternal mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti kondisi sosial, nilai – nilai dan pandangan masyarakat.

2.1.2 Definisi Auditing

Agoes (2012:3) mendefinisikan auditing adalah suatu pemekriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Mulyadi (2016:9) mendefinisikan auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai tnetang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk mengevaluasi berbagai bukti audit dengan tujuan memberikan informasi yang wajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2.1.3 Pengertian Auditor

Secara umum, auditor dapat didefinisikan sebagai orang dengan kualifikasi tertentu untuk mengaudit laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau

organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), auditor adalah pengaudit atau orang yang ditunjuk untuk melakukan audit.

Menurut Mulyadi (2016:11) ditinjau dari sudut profesi akuntan publik, auditor adalah pemeriksa (*examination*) secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut.

Kesimpulannya, seperti dijelaskan di atas, auditor adalah orang yang melakukan tugas untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi untuk memastikan kewajaran laporan keuangan. Auditor dapat digolongkan menjadi tiga tipe yaitu sebagai berikut :

- a) Auditor independen merupakan auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Klien dapat berupa perusahaan bisnis yang berorientasi laba, organisasi nirlaba, badan pemerintahan maupun usaha individu perorangan. Lisensi untuk dapat melakukan suatu audit diberikan pada mereka yang telah lulus ujian CPA serta memiliki pengalaman praktik dalam bidang auditing. Auditor ini bertanggung jawab atas pemeriksaan atau mengaudit laporan keuangan dengan memberikan opini atas informasi yang diauditnya.
- b) Auditor pemerintahan merupakan auditor profesional yang bekerja pada instansi pemerintahan yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggung jawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah.

Meskipun terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak.

- c) Auditor intern merupakan auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah di patuhi, mementukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.

Namun Arens & Loebeckke dalam bukunya auditing pendekatan terpadu yang diadaptasi oleh Jusuf (2008), menambahkan satu lagi jenis auditor, yaitu :

- d) Auditor Pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah Departemen Keuanga Republik Indonesia, bertanggung jawab atas penerimaan negara dan sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksana DJP dilapangan adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak (Karipka). Karipka mempunyai auditor-auditor khusus. Tanggung jawab Karipka adalah melakukan audit terhadap para wajib pajak tertentu untuk menilai apakah telah memenuhi ketentuan perundangan perpajakan.

2.1.4 Profesi Akuntan Publik

Menurut Halim (2015:13) menjelaskan profesi berasal dari kata latin *profess* yang berarti pengakuan atau pernyataan dimuka umum suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi apabila memiliki minimal 3 syarat, yaitu :

- a) Diperlukan suatu pendidikan profesi tertentu (biasanya setingkat S1) dan dapat ditambah dengan pendidikan profesi.
- b) Diperlukan suatu pengaturan terhadap diri pribadi didasarkan pada kode etik profesi.
- c) Diperlukan penelaahan dan atau izin dari penguasa (pemerintah).

Akuntan publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu.

Profesi akuntan publik merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian. Akuntan publik berperan dalam peningkatan kualitas dan kredibilitas informasi keuangan, serta mendorong peningkatan *good corporate governance*.

Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2011 Pasal 6 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Memiliki sertifikat danda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah.
- b) Berpengalaman praktik memberikan jasa asurans.

- c) Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- e) Menjadi anggota Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri, dan
- f) Tidak berada dalam pengampunan.

Akuntan publik memperoleh izin selama lima tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat di perpanjang. Apabila masa berlaku izin Akuntan Publik telah berakhir dan tidak memperoleh perpanjangan izin, yang bersangkutan tidak lagi menjadi Akuntan Publik dan tidak dapat memberikan jasa asurans.

Menteri Keuangan juga mengeluarkan peraturan Nomor 25/PMK.01/2014 tentang Akuntan Berigister Negara. Pasal 1 dalam aturan tersebut menjelaskan bahwa akuntan adalah seseorang yang telah terdaftar pada Register Negara Akuntan yang diselenggarakan oleh Menteri. Register Negara Akuntan adalah suatu daftar yang memuat nomor dan nama orang yang berhak menyandang gelar Akuntan dengan Peraturan Menteri. Nomor Register Akuntan diperoleh dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Lulus pendidikan profesi akuntansi atau lulus ujian sertifikasi akuntan profesional
- b) Berpengalaman dibidang akuntansi
- c) Sebagao anggota Asosiasi Profesi Akuntan

2.1.5 Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik. Menurut Mulyadi (2009) menyatakan pengertian dari KAP adalah suatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa profesional didalam praktek akuntan publik.

KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 2011, tentang Akuntan Publik dan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Arens, et al (2003) menjelaskan bahwa ukuran KAP merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan kecilnya suatu kantor akuntan publik. Ukuran KAP dapat dikatakan besar jika KAP tersebut berafiliasi dengan big four, mempunyai cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan besar serta mempunyai tenaga profesional diatas 30 orang. Sedangkan KAP dikatakan kecil jika tidak berafiliasi dengan big four, tidak mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan-perusahaan kecil serta jumlah profesionalnya kurang dari 25 orang. Kantor akuntan besar disebutkan memiliki akuntan yang berperilaku lebih beretika daripada akuntan di kantor akuntan kecil (Loeb, 1971). Dengan demikian kantor akuntan besar lebih memiliki reputasi baik dalam opini publik. DeAngelo (1981) menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil.

Dengan demikian pihak manajemen akan segera menyampaikan laporan akuntan yang telah diaudit kantor akuntan besar secara tepat waktu.

Perkembangan KAP di Amerika Serikat sudah sangat jauh sejalan dengan perkembangan perekonomian. Kantor-kantor ini dapat dibagi menjadi empat kategori. Yaitu, kantor akuntan besar internasional, kantor akuntan besar nasional, kantor akuntan regional dan lokal, dan kantor akuntan regional kecil. Kantor akuntan besar memiliki ribuan karyawan dan mitra yang tersebar di beberapa cabang di berbagai negara, sementara kantor akuntan kecil hanya memiliki beberapa karyawan di wilayah yang terbatas.

Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (2014) menjelaskan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan sebagai dasar persebaran disusun berdasarkan komposisi jumlah rekan KAP sebagaimana diuraikan berikut ini :

- a) KAP Kecil yaitu : KAP Perseorangan
- b) KAP Menengah yaitu : KAP Persekutuan dengan 2-5 orang rekan
- c) KAP Besar yaitu : KAP Persekutuan dengan 6-10 orang rekan, namun tidak termasuk KAP *Big Four*
- d) KAP *Big Four* yaitu : KAP yang bekerja sama dengan organisasi Audit Asing (OAA) yang merupakan kategori *Big Four* di dunia.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) dibedakan menjadi dua antara lain : ukuran kantor akuntan publik besar dan kecil. Dibedakan berdasarkan jumlah partner dan staf profesional atau auditor. Hal itu berpengaruh juga dengan jumlah klien yang dimiliki.

2.1.6 Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendidikan yang diterima dan dimiliki seorang pegawai, maka semakin besar pula pemahaman dan pengetahuannya. Karyawan yang berpendidikan tinggi memiliki kinerja yang berbeda dari karyawan yang memiliki jenjang pendidikan yang rendah.

Mulyadi (2016:53) Prinsip Profesi Akuntansi Indonesia yang diputuskan dalam kongres VII tahun 1998 yaitu pada prinsip ke lima menjelaskan bahwa untuk mencapai kompetensi profesional pada awalnya memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subyek-subyek yang relevan.

Standar umum auditing menegaskan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sehingga pendidikan formal dan pendidikan profesi berkelanjutan sangat diperlukan untuk seorang auditor untuk menjalankan profesinya dengan efektif dan efisien.

Pendidikan pada penelitian ini adalah pendidikan jangka panjang atau pendidikan formal yang didapat oleh seorang auditor. Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang standar audit Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah (APIP) minimal strata satu (S1) atau yang setara, untuk itu diperlukan pengembangan teknik dan metodologi pemeriksaan melalui pelatihan, pelatihan yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik guna menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.

Auditor yang menjabat sebagai seorang *partner* (rekan) harus mempunyai *Certified Public Accountant* (CPA) dan mengikuti pendidikan dan pelatihan profesional berkelanjutan (*continuing profesional education*). Pemeriksa juga wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik pemeriksaan. Pimpinan APIP wajib memfasilitasi auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan serta ujian sertifikasi sesuai dengan ketentuan. Dalam pengusulan auditor untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan jenjangnya, pimpinan APIP mendasarkan keputusannya pada formasi yang dibutuhkan dan persyaratan administrasi lainnya seperti kepangkatan dan pengumpulan angka kredit yang dimilikinya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pendidikan seorang auditor yaitu pendidikan formal minimal strata satu (S1) dan pendidikan khusus profesi berkelanjutan yang berupa pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain sebagainya. Tujuan dari ketentuan ini adalah agar auditor independen selalu mengikuti perkembangan terbaru dibidang akuntansi, penagauditan dan bidang-bidang lainnya yang terkait.

2.1.7 Hirarki Jabatan

Menurut Mulyadi (2016:33) menjelaskan hierarki jabatan merupakan tingkat jabatan yang dijabat saat ini oleh auditor di KAP. Umumnya hierarki auditor dalam perikatan audit di dalam kantor akuntan publik dibagi menjadi 4 yaitu :

- a) Partner (Rekan) menduduki jabatan tertinggi dalam perikatan audit bertanggung jawab atas hubungan dengan klien bertanggung jawab secara menyeluruh mengenai auditing.

- b) Manajer bertindak sebagai pengawas audit Bertugas untuk membantu auditor senior dalam merencanakan program audit dan waktu audit, meriview kertas kena, laporan audit dan manajemen letter Biasanya manajer melakukan pengawasan terhadap perkenaan beberapa auditor senior.
- c) Auditor Senior bertugas untuk melaksanakan audit bertanggung jawab untuk mengusahakan biaya audit dan waktu audit seusai dengan rencana Bertugas untuk mengarahkan dan mereview perkejaan auditor junior
- d) Auditor Junior melaksanakan prosedur audit secara rinci membuat kertas kerja untuk mendokumentasikan perkerjaan audit yang telah dilaksanakan.

Halim (2015 : 126) menyatakan hal yang sama bahwa umumnya hierarki dan komposisi tersebut memang relatif ada 4 tingkat yaitu *partner*, manajer, akuntan senior, akuntan junior. Sebagai contoh komposisi staf tersebut dapat berupa satu orang *partner*, dengan satu atau dua orang manajer, tiga hingga empat orang akuntan senior, dan lima hingga enma orang akuntan junior. Jadi dapat saja bervariasi. Misalnya mungkin ada kantor akuntan yang menggolongkan akuntan semi senior, dan senior. Demikian pula, bisa saja sebuah kantor junior, akuntan publik mempunyai asisten akuntan.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita petik bahwa gambaran hierarki jabatan dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1.**Hirarki Jabatan Kantor Akuntan Publik**

Sumber : data diolah (2020)

Dapat dilihat dengan jelas berdasarkan gambaran diatas bahwa hierarki akuntan publik di KAP (Kantor Akuntan Publik) dalam penugasan audit sesuai dengan tingkatan yang ada di dalamnya. Karakteristik hierarki dalam KAP membantu meningkatkan kompetensi dalam memberikan pelayanan yang lebih terhadap klien.

2.1.8 Pengalaman Auditor

Pengalaman merupakan unsur profesional yang penting untuk membangun pengetahuan dan keahlian seorang auditor. Sebagaimana yang disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) bahwa persyaratan yang dituntut dan auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktek sebagai auditor independen. Pengalaman bagi seorang auditor

merupakan elemen penting dalam menjalankan profesinya selain dari pendidikan. Pengalaman dapat di peroleh melalui pelatihan-pelatihan, supervisi, maupun review terhadap hasil pekerjaan yang diberikan oleh auditor yang lebih berpengalaman.

Mulyadi (2016:34) menjelaskan bahwa jika seseorang memasuki karir sebagai akuntan publik, harus lebih dulu mencari pengalaman profesi dibawah pengawasan akuntan senior yang lebih berpengalaman. Bahkan agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya, pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja sekurang-kurangnya tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik dibidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK 01/2018 tentang jasa akuntan publik

Berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan pengalaman auditor adalah tingkat penguasaan dan pemahaman tentang pekerjaan yang dimiliki seseorang auditor, lamanya bekerja sebagai auditor, dan pelatihan yang telah diperoleh sehubungan dengan auditor serta keinginan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang akuntan publik.

2.1.9 Etika

Etika secara umum didefinisikan sebagai nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh suatu golongan tertentu atau individu (Sukanto, 1991). Etika profesi merupakan karakteristik suatu profesi yang membedakan suatu profesi dengan profesi lain, yang berfungsi untuk mengatur

tingkah laku para anggotanya (Murtanto dan Marini 2003). Dengan adanya etika profesi akuntan, maka fungsi akuntan sebagai penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis dapat dijalankan oleh para pelaku bisnis.

Menurut Magnis (1989 : 14) dan Keraf (1991 : 20) bahwa untuk memahami etika perlu dibedakan dengan moralitas. Moralitas adalah suatu sistem nilai tentang bagaimana seseorang harus hidup sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran-ajaran, moralitas memberi manusia aturan atau petunjuk konkrit tentang bagaimana harus hidup, bagaimana harus bertindak dalam hidup ini sebagai manusia yang baik dan bagaimana menghindari perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan etika berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.

Etika profesi akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Akuntan Indonesia. Kode etik ini mengikat para anggota IAI di satu sisi dan dapat dipergunakan oleh akuntan lainnya yang bukan atau belum menjadi anggota IAI di sisi lainnya. Kode Etik Profesi Akuntan Publik (sebelumnya disebut Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik). Kode etik salah satu upaya dari suatu asosiasi profesi untuk menjaga integritas profesi tersebut agar mampu menghadapi berbagai tekanan yang dapat muncul dari dirinya atau pihak luar. Anggota profesi seharusnya mentaati kode etik profesi sebagai wujud kontra profesi bagi masyarakat dan kepercayaan yang diberikannya (Saryanti, 2012:2).

Maksud ditetapkan Kode Etik Auditor adalah memberikan pedoman perilaku bagi auditor dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya. Untuk itu disyaratkan, diberlakukannya dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntun disiplin dari auditor APIP yang melebihi tuntutan peraturan perundang-undangan

berupa kode etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing auditor. Kode etik menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yaitu Integritas, obyektifitas, kerahasiaan dan kompetensi.

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas maka yang dimaksud dengan etika merupakan nilai-nilai tingkah laku atau aturan-aturan tingkah laku yang diterima dan digunakan oleh organisasi profesi akuntan yang meliputi kepribadian, kecakapan profesional, tanggung jawab.

2.1.10 Pengertian Professionalsime

Profesionalisme merupakan atribut individual yang penting tanpa melihat suatu jenis pekerjaan. Sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang berdasarkan pada pendidikan dengan keahlian tertentu sebagai profesionalisme, akuntan publik mengakui tanggung jawabnya terhadap masyarakat.

Dalam pengertian umum, seseorang dapat dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yaitu memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan tugas atau profesi sesuai standar di bidangprofesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan memenuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Menurut Tugiman (1996) dalam Asikin (2006:800), seseorang yang profesional disamping mempunyai keahlian dan kecakapan teknis harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata, dan perbuatan.

Menurut Arens (2008:105) profesionalisme adalah tanggung jawab individu untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar mematuhi undang-undang dan peraturan yang ada. Kesimpulan mengenai profesionalisme mengacu pada berhubungan dengan profesi dimana profesionalisme untuk sikap atau mental dalam bentuk komitmen dari para anggota profesi senantiasa meningkatkan dan mewujudkan kualitas profesionalnya.

2.1.11 Konsep Profesionalisme

Dalam penelitian ini konsep profesionalisme yang digunakan adalah konsep untuk mengukur bagaimana para profesional memandang profesi mereka yang tercermin pada kinerja, sikap dan perilaku mereka. Dengan anggapan bahwa sikap dan perilaku mempunyai hubungan timbal balik.

Adapun lima konsep profesionalisme dari Hall (1968) secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a) Afiliasi Komunikasi (*community affiliation*) yaitu menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi dormal dan kelompok-kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi.
- b) Kebutuhan untuk mandiri (*autonomi demand*) merpuakan suatu pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (Pemerintah, klien, mereka yang bukan anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberika hak-hak istimewa untuk

membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang terbaik menurut karyawan yang bersangkutan dalam situasi khusus. Dalam pekerjaan yang terstruktur dan dikendalikan oleh manajemen secara ketat, akan sulit menciptakan tugas yang menimbulkan rasa kemandirian dalam tugas.

- c) Keyakinan terhadap peraturan sendiri profesi (*belief self regulation*) dimaksud bahwa yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang tugas.
- d) Dedikasi pada profesi (*dedication*) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan rohani dan setelah itu baru materi.
- e) Kewajiban sosial (*social obligation*) merupakan pandangan tentang pentingnya, profesi serta manfaat yang diperoleh baik oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Penelitian dengan menggunakan dimensi profesionalisme seperti tersebut diatas belum diteliti secara lebih luas, tetapi beberapa penelitian empiris mendukung bahwa profesionalisme adalah bersifat multidemensa walaupun tidak selalu identik bila diterapkan pada anggota kelompok yang berbeda.

2.2 Hasil penelitian sebelumnya

Penelitian Darmoko (2012) meneliti tentang profesionalisme auditor pada KAP dilihat dari perbedaan gender, tipe KAP, dan hierarki jabatannya. Teknis analisis datanya adalah Analisis t-test dan ANOVA. Profesionalisme Auditor sebagai variabel dependen. Dan gender, tipe KAP, dan hierarki jabatannya sebagai variabel independen. Teknik pengambilan sampel yaitu berdasarkan kelompok atau *clustered sampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian Darmoko (2012) adalah menggunakan kuesioner. Kuesioner yang disebar sebanyak 900, dan yang kembali sebanyak 179. Penelitian ini dilakukan pada KAP yang terdapat di Jawa. Hasil Penelitian Darmoko menunjukkan bahwa jika dilihat dari gender tidak terdapat perbedaan profesionalisme, berarti antara auditor pria maupun wanita memiliki tingkat profesionalisme yang sama. Berdasarkan tipe KAP dan hierarki jabatannya terdapat perbedaan profesionalisme artinya auditor di KAP yang berafiliasi dengan auditor KAP nasional memiliki tingkat profesionalisme yang tidak sama, serta perbedaan posisi hierarki jabatan auditor di KAP juga menyebabkan perbedaan tingkat profesionalisme

Penelitian Cahayu (2013) meneliti tentang pengaruh etika, pendidikan, pengalaman, terhadap profesionalisme auditor internal dengan motivasi sebagai variabel intervening. Penelitian Cahayu menggunakan etika, pendidikan, pengalaman sebagai variabel independen, profesionalisme sebagai variabel dependen dan motivasi sebagai variabel intervening. Teknis analisis datanya adalah Analisis jalur (*path analysis*). Penelitian ini tidak menggunakan sampel penelitian dikarenakan jumlah pegawai yang sedikit dan jumlah individu dalam kelompok memiliki jumlah yang tetap dan terhitung, oleh karena itu digunakan sensus.

Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, kuesioner yang disebarakan sebanyak 67 dan yang kembali sebanyak 55. Penelitian Cahayu dilakukan di Inspektorat Jendral Kementerian Republik Indonesia. Hasil penelitian Cahayu menunjukkan bahwa pengaruh langsung etika, pendidikan, dan pengalaman terhadap profesionalisme auditor menunjukkan hasil yang signifikan, dan pengaruh tidak langsungnya jika terlebih dahulu melewati motivasi menunjukkan hasil yang signifikan pula.

Penelitian Andika (2020) meneliti tentang pengaruh pengalaman, tingkat pendidikan, *hierarchical position* dan ukuran KAP terhadap profesionalisme auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali. Andika menggunakan pengalaman, tingkat pendidikan, *hierarchical position*, dan ukuran KAP sebagai variabel dependen, profesionalisme sebagai variabel dependen. Teknis analisisnya menggunakan regresi linear berganda. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data diperoleh dengan langsung memberikan kuesioner kepada responden sebanyak 62 dan yang kembali sebanyak 56 kuesioner. Hasil penelitian Andika menunjukkan bahwa pengalaman, *hierarchical position*, tingkat pendidikan, dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor.

Penelitian Putri & Juliarsa (2014) meneliti tentang pengaruh independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman dan kepuasan kerja auditor pada kualitas audit Kantor Akuntan publik di Bali. Penelitian Putri dan Juliarsa menggunakan independensi, profesionalisme, tingkat pendidikan, etika profesi, pengalaman, kepuasan kerja sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel dependen. Teknis analisis data adalah analisis regresi berganda. Tingkat pendidikan, etika profesi, kepuasan kerja auditor berpengaruh

terhadap kualitas audit. Independensi, profesionalisme, pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian Ekawati (2013) meneliti pengaruh profesionalisme, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas (studi empiris pada kantor akuntan publik di wilayah Bali). Penelitian Ekawati (2013) menggunakan profesionalisme, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan auditor sebagai variabel independen dan pertimbangan tingkat materialitas sebagai variabel dependen. Teknik analisisnya adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel – variabel independen mendukung semua hipotesis. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling*. Metode pengumpulan datanya menggunakan kuesioner. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme, pengalaman kerja, dan tingkat pendidikan auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Semakin tinggi tingkat profesionalisme, pengalaman kerja, tingkat pendidikan auditor semakin baik pula pertimbangan tingkat materialitasnya.

Penelitian Winarti (2017) meneliti pengaruh diskriminasi gender, pengalaman kerja, dan sensitivitas etika terhadap profesionalisme auditor di instansi pemerintah. Penelitian Winarti (2017) menggunakan diskriminasi gender, pengalaman kerja, sensitivitas etika sebagai variabel independen dan profesionalisme sebagai variabel dependen. Teknik analisis datanya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian dari Winarti (2017) menunjukkan bahwa apabila sensitivitas etika semakin tinggi, maka profesionalisme auditor juga semakin tinggi. Diskriminasi gender, pengalaman kerja, dan sensitivitas etika berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme auditor. Metode pengumpulan

datanya menggunakan kuesioner. Penelitian Winarti dilakukan di inspektorat wilayah bali.

Penelitian Vanesa (2016) meneliti tentang ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan hierarki jabatan sebagai variabel independen dan profesionalisme auditor sebagai variabel dependen. Teknik analisisnya menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *random sampling*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan tiga metode yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara, jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 50 dan yang kembali sebanyak 42 kuesioner. Hasil penelitian Vanesa menyimpulkan bahwa ukuran kantor akuntan publik (KAP), dan hierarki jabatan, terbukti memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap profesionalisme auditor.

Penelitian Purnamaningtyas (2019) meneliti tentang pengalaman auditor, *hierarchical position*, tingkat pendidikan, dan ukuran KAP terhadap profesionalisme auditor Kantor Akuntan Publik di Bali. Penelitian Purnamaningtyas menggunakan pengalaman auditor, *hierarchical position*, tingkat pendidikan, dan ukuran KAP sebagai variabel independen dan profesionalisme auditor sebagai variabel dependen. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Teknik pengambilan sampelnya adalah menggunakan sampel jenuh. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, kuesioner yang disebar sebanyak 44 dan kuesioner yang kembali sebanyak 44. Hasil penelitian dari Purnamaningtyas menyimpulkan bahwa pengalaman auditor, *hierarchical position*, tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor, sedangkan tingkat pendidikan dan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap profesionalisme auditor.

Penelitian Dewi (2012) meneliti tentang pengaruh pengalaman kerja, *hierarchical position*, gender, dan ukuran KAP terhadap profesionalisme auditor di Bali. Teknis analisis data menggunakan regresi liner berganda. Variabel independen yaitu pengalaman kerja, *hierarchical position*, gender, dan ukuran KAP. Variabel dependen yaitu profesionalisme auditor. Teknik pengambilan sampel yaitu menggunakan sampel jenuh yaitu dengan mengambil seluruh populasi. Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian Dewi yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disebar sebanyak 81 dan kuesioner yang kembali sebanyak 60. Hasil penelitian Dewi menjelaskan bahwa variabel pengalaman kerja, *hierarchical position*, dan ukuran KAP secara parsial berpengaruh terhadap profesionalisme auditor. Sedangkan variabel gender secara parsial tidak berpengaruh terhadap profesionalisme auditor.

Penelitian Putri & Suputra (2013) meneliti tentang pengaruh independensi, profesionalisme, dan etika profesi terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di bali. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda dengan melihat koefisien determinasi. Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 76 dan yang kembali sebanyak 55 kuesioner. Hasil penelitian Putri & Suputra (2013) menjelaskan bahwa independensi, profesionalisme, dan etika berpengaruh positif terhadap kinerja auditor pada kantor akuntan publik di bali. Variabel independen yaitu independensi, profesionalisme, dan etika profesi. variabel dependen yaitu kinerja auditor.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabelnya yaitu Ukuran KAP, *Hierarchical Position*, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Auditor, dan Etika sebagai variabel independen dan Profesionalisme Auditor sebagai variabel dependen. Teknik analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitiannya yaitu pada daerah Bali, Jawa, Inspektorat Jendral Kementerian Republik Indonesia, Inspektorat daerah Bali. Ada beberapa perbedaan variabel independen dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang. Adapun perbedaan dalam teknik pengambilan sampel digunakan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang (penelitian sekarang menggunakan Sampling Jenuh).